



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Sosial adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Sosial adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Sosial serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Dinas Sosial Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Dinas Sosial, hasil evaluasi Renja Dinas Sosial tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Dinas Sosial tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Dinas Sosial Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Dinas Sosial Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Dinas Sosial Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Dinas Sosial.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 83



RENCANA KERJA (RENJA)

2022

DINAS SOSIAL
KABUPATEN PASURUAN

Jalan dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 59 Pasuruan
Telp. 0343-427605, 424387 | Fax. 0343-427605
Email : dinsoskabpas17@gmail.com

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021

RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Perencanaan jangka Panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) membuat dan memiliki Rancangan Awal Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpadua Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Menyusun Rencana Kerja Tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial

Kabupaten Pasuruan tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Pasuruan, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 tahun. Renja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas sosial Kabupaten Pasuruan tahun 2022 di dalam penyusunannya mengacu pada program dan kebijakan pemerintah pusat yaitu Permensos No 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota lampiran V yang menerangkan masalah pengelompokan tugas berdasarkan fungsi dari Dinas Sosial dan Permendagri No. 67 tahun 2011 tentang perubahan – perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam Menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan tahun 2022 yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada sasaran.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dilandasi oleh beberapa payung hukum sebagai berikut:

1. Landasaan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang Undang Dasar (UUD) 1945
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
- p. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- q. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah;
- r. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Pasuruan;
- s. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja.

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan adalah :

1. Memberikan arah, kebijakan dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial selama 1 (satu) tahun anggaran oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan tahun 2022.
2. Sebagai media Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien menuju terciptanya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
3. Sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen OPD, Renstra OPD dan dokumen lainnya serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2022, mengacu pada APBD tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain uraian realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi dan melebihi target kinerja yang direncanakan serta faktor-faktor penyebabnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian tentang :

- Sejauh mana kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.
- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan MDG's (*Millenium Development Goals*).
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian tentang proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal OPD dengan hasil analisis kebutuhan, serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal OPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para stakeholder dan masyarakat lainnya dan penjelasan tentang proses bagaimana usulan program dan kegiatan tersebut diperoleh, serta penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program Dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan beserta kebutuhan lainnya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian garis besar tentang penyusunan rencana kerja OPD dan penganggaran OPD.

BAB V. PENUTUP

Berisikan kesimpulan tentang penyusunan Renja OPD.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 ini dilakukan analisa terhadap pencapaian kinerja OPD sampai tahun 2021 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode sebelumnya, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Di tahun 2021 anggaran Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 10.324.539.820 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) yang terdiri dari 7 Program, 16 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Sehubungan dengan Pandemi Covid-19, anggaran Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 di refocussing sehingga menjadi Rp. 9.560.539.820 (Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
						Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2020											
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		PERSENTASE PEMENUHAN PELAYANAN KANTOR								
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Yang Terkirim		8000 Surat	8000 Surat	6850 surat	85,6%			
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air, Telpon Yang Terbayar		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor		5 Unit	5 Unit	3 Unit	60%			
	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honor Adminitrasi Keuangan Yang Terbayar		331 Kali	331 Kali	331 Kali	100%			

	5	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ATK		100%	100%	100%	100%			
	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		178026 Lembar	178026 Lembar	198026 Lembar	100%			
	7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Tersedianya Makan dan Minuman Rapat		2136 Kotak	4000 Kotak	2518 Kotak	62,95%			
	8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		188 Kali	208 Kali	150 Kali	72,11%			
	9	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Terbayarnya Gaji Honorer		216 Kali	216 Kali	216 Kali	100%			
	#	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM Diklat Teknis Bagi Aparatur		40 Peserta	40 Peserta	-	-			
	#	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Forum OPD, Penyusunan Renja dan Laporan OPD, Musrenbang		10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%			
	#	Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pembelian Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		55 Potong	-	-				
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA KONDISI BAIK								
	1	Pengadaan Mebelair	Jumlah Pengadaan Mebelair		21 Unit	11 Unit	9 Unit	81,81%			
	2	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor		38 Unit	75 Unit	75 Unit -	100%			
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		600 M2	600 M2	600 M2	100%			

	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	26 Unit/Kali	26 Unit/Kali	35 Unit/Kali	100%			
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor	20 Unit/Kali	20 Unit/Kali	15 Unit/Kali	75%			
PROGRAM FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL			PERSENTASE PEMBERDAYAAN SOSIAL YANG TEPAT SASARAN							
	1	Pemberdayaan WRSE (Monev Jadub dan RTLH)	Jumlah WRSE Yang Berdayaguna	500 Orang	400 orang	-	-			
	2	Pemeliharaan dan Rehab Taman Makan Pahlawan (TMP)	Jumlah Pemeliharaan dan Rehab TMP	11 TMP	11 TMP	-	-			
	3	Pemantapan Pekerja Sosial Masyarakat Terkait Dengan Pendataan PMKS	Jumlah peserta Pembinaan dan Pemberdayaan Pendataan PMKS	288 Orang	120 Orang	120 orang	100%			
	4	Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna	430 Orang	430 Orang	-	-			
	5	Verval BDT	Jumlah Pendataan Verval BDT Tepat Sasaran	450 Orang	450 Orang	300 Orang	66,67%			
	6	Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Pendataan PMKS DAN PSKS	26 PMKS	26 PMKS	20 PMKS	76,92%			
				720 PSKS	601 PSKS					
	7	Penghargaan dan Bantuan Sosial Bagi Pahlawan, Perintis dan Pejuang (Sarasehan dan Bansos)	Jumlah Penghargaan yang Diberikan Bagi Pahlawan dan Perintis	420 Orang	420 Orang	420 orang	100%			
			Jumlah Peserta Sosialisasi Kepahlawanan dan Keperintisan	-						
			Jumlah Even HKSAN Yang Dilaksanakan	-						

	8	Pemberdayaan Keluarga Rentan (Pendampingan KUBE)	Jumlah Pembentukan dan Penilaian KUBE		1 KUBE	1 KUBE	3 Kube	100%			
	9	Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Fakir Miskin (BPNT)	Jumlah Kuantitas BPNT		109.031 KPM	109.031 KPM	109.031 KPM	100%			
	10	Oprasional Sembako	Jumlah Pendistribusian Sembako Tepat Sasaran		600 Paket	600 Paket	600 Paket	100%			
PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL			PERSENTASE PMKS YANG DIREHABILITASI								
	1	Pelayanan Panti Anak	Jumlah LKSA Yang Mendapatkan Pelatihan dan Penerima Bantuan		37 LKSA	37 LKSA	37 LKSA	100%			
			Jumlah Kasus Anak Diselesaikan		65	140	140	100%			
	2	Pelayanan dan Bimbingan Sosial Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar Dilatih dan Dibantu		20	35	35	100%			
			Jumlah Kasus Anak Terlantar Yang terselesaikan		1215	1215	1211	99,67%			
	3	Tetirah Anak	Jumlah Anak Rehabilitasi Sosial								
	4	Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS Hasil Razia (Gelandangan, Pengemis, Tuna Sosial dan Anak Jalanan)	Jumlah Pelayanan dan Rehabilitasi Hasil Razia Yang Tertangani		350	350	150	42,85%			
			Jumlah Penjemputan/Pengantaran Bagi Gepeng/Anak Jalanan dan Tuna Sosial Lainnya		350	350	100	42,85%			

	5	Penanganan Lansia dan Peringatan HALLUN	Jumlah Penanganan Lanjut Usia Terlantar	-						
			Jumlah Lansia Penerima Bantuan	100	150	150	100%			
			Jumlah Lansia Yang Di Bimbing Dan Pemberdayaan	-	-	-				
	6	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Bimbingan Lanjut eks. Klien	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	197	197	192	97,46%			
			Jumlah Eks Klien Yang Diberi Bantuan	50	116	116	100%			
			Jumlah Eks Klien Yang Di Beri Pelatihan	-						
			Jumlah Disabilitas Yang Di Berdayakan	-						
	7	Rehabilitasi eks. Narapidana	Jumlah Eks Narapidana Yang Di Berangkatkan Dan Dibina							
	8	Pengelolaan Shelther/Rumah Singgah	Jumlah Perlengkapan Habis Pakai Yang Disediakan	250	250	150	42,85%			
	9		Jumlah Sarana Prasarana Yang Disediakan	-						
	#		Jumlah Orang Yang Memanfaatkan Shelther	-						

	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE KELUARGA PENERIMA MANFAAT YANG GRADUASI		PKH : 89744KPM, KPM, Pendamping & Operator PKH : 320 Orang, 90000 Orang Korban Bencana & OT						
	1 Pengembangan dan Penyelenggran Sistem Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Sosialisasi KPM PKH		-						
		Jumlah Peserta Bimtek Bagi Operator Dan Pendamping PKH		-						
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Dan Ketrampilan Bagi KPM		120.114	125.114	138.811	100%			
		Jumlah Data PBI JK Yang Dimutahirkan		-						
		Jumlah Peserta Sosialisasi Keluarga		-						
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Tepat Waktu		-						
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Peserta Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)		89.744	89.744	138.811	100%			
		Jumlah Pembayaran Jasa Operator/ Pendamping PKH		360	360	360	100%			

		2	Penyuluhan dan Publikasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyuluhan Masalah Kesejahteraan Sosial		-							
		3	Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kebencanaan Di Kampung Siaga Bencana		-							
				Jumlah Korban Bencana Alam dan sosial Yang Mendapatkan Bantuan		7500 Orang	7500 orang	123.516	100%				
				Jumlah Peserta Sosialisasi Kebencanaan		45 Orang Sukarelawan							
				Jumlah Peserta Tagana Yang Mendapatkan Pelatihan		20 Anggota Tagana							
				Jumlah Anggota KSB Yang Memperoleh Pelatihan		-							
				Jumlah Anggota Tagana Yang Mendapatkan Pembayaran Jasa		45 Orang	45 Orang	45 Orang	100%				
		4	Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah dan Korban Tindak Kekerasan/Perlakuan Salah	Jumlah Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental Lansia Tidak Potensial Serta Perdagangan		-							
				Jumlah Kasus Yang Tertangani		10 Orang	2 orang	2 orang	100%				
		5	Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar	Jumlah Penanganan dan Perlindungan Orang Terlantar		-							
				Jumlah Dokumen Monev Perlindungan Dan Jaminan Sosial Tepat Waktu		-							

	6	Pemulihan dan Perlindungan Sosial eks Korban Bencana	Jumlah Pemulihan Trauma Pasca Kebencanaan								
2021											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %					100 %	100	1
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %					100 %	100	1
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	6 Dokumen					6 Dokumen	6	1
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan					1 Laporan	1	1
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang Disusun	1 Laporan					1 Laporan	1	1
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %					100 %	100	1
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang-Bulan					30 Orang-Bulan	30	1
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	24 Orang-Bulan					24 Orang-Bulan	24	1

	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	100 %					100 %	100	1
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47 Unit					47 Unit	47	1
	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	17 Jenis					17 Jenis	17	1
	3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	600 Orang					600 Orang	600	1
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	45 Laporan					45 Laporan	45	1
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %					100 %	100	1
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit					1 Unit	1	1
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100 %					100 %	100	1
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim Melalui Jasa Kurir	150 Surat					150 Surat	150	1
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telpon, Air dan Internet Selama 12 bulan	36 Rekening					36 Rekening	36	1
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Jenis					17 Jenis	17	1

	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Layanan Umum Kantor	47 Jenis					47 Jenis	47	1
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %					100 %	100	1
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit					4 Unit	4	1
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit					2 Unit	2	1
		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
		BIDANG FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL									
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS dan PSKS	6,5 %					6,5 %	6,5	1
		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Peremberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	6,5 %					6,5 %	6,5	1

	1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Bantuan yang Disalurkan	400 Orang				400 Orang	400	1
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Menindaklanjuti Pemberdayaan	6,58 %				6,58 %	6,58	1
	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang Menerima Peningkatan Kemampuan	48 Orang / 4 Laporan				48 Orang / 4 Laporan	48	1
	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang Menerima Peningkatan Kemampuan	100 Orang				100 Orang	100	1
	3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial yang Menerima Peningkatan Kemampuan	20 Orang				20 Orang	20	1
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Pengelolaan TMP	6,58 %				6,58 %	6,58	1
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang Dipelihara	6,58 %				6,58 %	6,58	1
	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang Terpelihara dan Jumlah Honorarium Penjaga TMP	11 Orang/ TMP				11 Orang/ TMP	11	1

	BIDANG REHABILITASI SOSIAL									
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PMKS yang Tertangani	85,65 %				85,65 %	85,65	1
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	85,65 %				85,65 %	85,65	1
	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Permakanan	37 Lembaga				37 Lembaga	37	1
	2	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Alat Bantu	37 Orang				37 Orang	37	1
	3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Bimbingan	240 Jiwa				240 Jiwa	240	1

	4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapat Bimbingan	287 Jiwa					287 Jiwa	287	1
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial	85,65 %					85,65 %	85,65	1
	1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	5 Orang					5 Orang	5	1
	2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah PMKS Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapat Bimbingan	225 Orang					225 Orang	225	1
	3	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan yang Diberikan	6 Kecamatan					6 Kecamatan	6	1
		BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan	85,65 %					85,65 %	85,65	1

	1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi	85,65 %					85,65 %	85,65	1
	2	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi Kabupaten ke Desa/Kelurahan Asal	5 5 Orang					5 5 Orang	5	1
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase PMKS dan Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Sosialnya	85,65 %					85,65 %	85,65	1
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapat Pelayanan Dasar	85,65 %					85,65 %	85,65	1
	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terbarukan	4 Pengesahan (1 Data)					4 Pengesahan (1 Data)	4	1
	2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapat Bantuan Kesejahteraan Sosial	337 337 SDM PKH dan 300 Orang					337 337 SDM PKH dan 300 Orang	337	1

	3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fakir Miskin yang Menindaklanjuti Hasil Bimbingan Sosial dan Keterampilan	2 Kube				2 Kube	2	1
PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Persentase Korban Bencana yang Tertangani	85,65 %				85,65 %	85,65	1
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Penanganan	85,65 %				85,65 %	85,65	1
	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Penyediaan Makanan	250 Orang				250 Orang	250	1
	2	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Pelayanan	10 10 Orang				10 10 Orang	10	1
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang Diberdayakan	6,58 %				6,58 %	6,58	1
	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	55 Orang				55 Orang	55	1
	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	45 Orang				45 Orang	45	1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kegiatan yang diselenggarakan adalah melaksanakan kewenangan Desentralisasi di Bidang Sosial dan tugas lain yang diberikan Bupati, yang sepenuhnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pasuruan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah tercantum dalam Rencana Strategis 2018-2023. Indikator kinerja tersebut adalah dasar utama dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahun. Sebagai bentuk upaya pencapaian realisasi terhadap target kinerja yang dilakukan. Dibawah ini akan diuraikan pencapaian kinerja pelayanan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			40,06%	42,97%	5,99%	-	-	-	-	-	-
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran			80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur			90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-
	Tersedianya Dokumen dan Laporan SKPD			90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-
	Persentase PMKS Skala Kabupaten Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	80,00%		14,00%	16,00%	33,00%	33,00%	-	-	-	-	-
	Persentase PMKS Skala Kabupaten/Kota yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	80,00%		14,00%	16,00%	30,00%	30,00%	-	-	-	-	-

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	80,00%		80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-
Persentase Korban Bencana Dalam 1 Tahun yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	60,00%		80,00%	80,00%	100,00%	100,00%					
Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Dalam 1 Tahun	60,00%		80,00%	80,00%	100,00%	100,00%					
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Dalam 1 Tahun	60,00%		40,00%	40,00%	80,00%	80,00%					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100,00%		100,00%	100,00%	-	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100,00%		100,00%	100,00%	-	64,50%	64,50%	64,50%	64,50%	64,50%	64,50%
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100,00%		100,00%	100,00%	-	30,64%	30,64%	30,64%	30,64%	30,64%	30,64%

	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100,00%		100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100,00%		100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pasuruan adalah :

- Kualitas manajemen, profesionalisme, proporsionalisme pelayanan kesejahteraan sosial merupakan prioritas utama yang mendesak untuk ditingkatkan. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga pekerja sosial fungsional di Kabupaten Pasuruan serta penempatan aparatur yang lebih proporsional sesuai dengan latar belakang dan terampil dalam penanganan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Pasuruan. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi dalam manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dan manajemen program belum terlaksana secara kreatif, inovatif, sistematis dan kurang terintegrasi, baik internal Dinas Sosial bidang kesejahteraan sosial maupun koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Sosial RI.
- Kurang optimalnya akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terhadap pelayanan sosial dasar. Kemampuan penanganan PMKS di Kabupaten Pasuruan masih kurang optimal seperti dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mendasar Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 100/2019 yang menargetkan 100%, sebagai konsekuensi urusan wajib pelayanan dasar.
- Persepsi masyarakat terhadap penanganan bidang sosial yang berorientasi pada pemberian bantuan saja dan merupakan kewajiban pemerintah. Persepsi demikian kiranya dapat menghambat pembangunan bidang sosial, karena menempatkan masyarakat sebagai obyek sekaligus hanya mendapatkan bantuan dari pemerintah saja. Oleh karena itu paradigma pembangunan dengan memberikan peran aktif masyarakat lebih proporsional diharapkan mampu membuat hasil pembangunan lebih baik, karena tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*) secara sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal OPD tahun 2022 setelah dilakukan perbandingan dan analisa terhadap Rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan terdapat keselarasan yang baik. Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kab. Pasuruan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp. 1.983.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp. 1.983.000.000,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	Rp. 120.000.000,00	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	Rp. 120.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	6 Dokumen	Rp. 40.000.000,00	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	6 Dokumen	Rp. 40.000.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp. 40.000.000,00	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp. 40.000.000,00	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi yang Disusun	1 Laporan	Rp. 40.000.000,00	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi yang Disusun	1 Laporan	Rp. 40.000.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	Rp. 750.000.000,00	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	Rp. 750.000.000,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang-Bulan	Rp. -	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang-Bulan	Rp. -	

	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	24 Orang-Bulan	Rp. 750.000.000,00		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	24 Orang-Bulan	Rp. 750.000.000,00	
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	100%	Rp. 318.000.000,00		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	100%	Rp. 318.000.000,00	
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47 Unit	Rp. 48.000.000,00		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47 Unit	Rp. 48.000.000,00	
	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	17 Jenis	Rp. 25.000.000,00		2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	17 Jenis	Rp. 25.000.000,00	
	3	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	600 Orang	Rp. 45.000.000,00		3	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	600 Orang	Rp. 45.000.000,00	
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Koordinasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	45 Laporan	Rp. 200.000.000,00		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Koordinasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	45 Laporan	Rp. 200.000.000,00	
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasuruan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp. -		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasuruan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp. -	
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	Rp. -		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	Rp. -	
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pasuruan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	Rp. 372.500.000,00		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pasuruan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	Rp. 372.500.000,00	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat yang Dikirim Melalui Jasa Kurir	150 Surat	Rp. 5.500.000,00		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat yang Dikirim Melalui Jasa Kurir	150 Surat	Rp. 5.500.000,00	

	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Pembayaran Telpon, Air dan Internet Selama 12 bulan	36 Rekening	Rp. 158.000.000,00		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Pembayaran Telpon, Air dan Internet Selama 12 bulan	36 Rekening	Rp. 158.000.000,00	
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Jenis	Rp. 110.000.000,00		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Jenis	Rp. 110.000.000,00	
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Layanan Umum Kantor	47 Jenis	Rp. 99.000.000,00		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Layanan Umum Kantor	47 Jenis	Rp. 99.000.000,00	
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pasuruan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp. 350.000.000,00		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pasuruan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp. 350.000.000,00	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	Rp. 300.000.000,00		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	Rp. 300.000.000,00	
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	Rp. 50.000.000,00		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	Rp. 50.000.000,00	
	7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%	Rp. 72.500.000,00		7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%	Rp. 72.500.000,00	
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	Rp. 72.500.000,00		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	Rp. 72.500.000,00	
2		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PMKS dan PSKS	6,58%	Rp. 981.000.000,00			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PMKS dan PSKS	6,58%	Rp. 981.000.000,00	

1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Pasuruan	Peremberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	6,58%	Rp. 473.000.000,00	1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Pasuruan	Peremberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	6,58%	Rp. 473.000.000,00
1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT		Jumlah Bantuan yang Disalurkan	400 Orang	Rp. 473.000.000,00	1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT		Jumlah Bantuan yang Disalurkan	400 Orang	Rp. 473.000.000,00
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pasuruan	Jumlah PSKS yang Menindaklanjuti Pemberdayaan	6,58%	Rp. 508.000.000,00	2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pasuruan	Jumlah PSKS yang Menindaklanjuti Pemberdayaan	6,58%	Rp. 508.000.000,00
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota		Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang Menerima Peningkatan Kemampuan	48 Orang / 4 Laporan	Rp. 478.000.000,00	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota		Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang Menerima Peningkatan Kemampuan	48 Orang / 4 Laporan	Rp. 478.000.000,00
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota		Jumlah Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang Menerima Peningkatan Kemampuan	100 Orang	Rp. 25.000.000,00	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota		Jumlah Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang Menerima Peningkatan Kemampuan	100 Orang	Rp. 25.000.000,00
3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah SDM dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial yang Menerima Peningkatan Kemampuan	20 Orang	Rp. 5.000.000,00	3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah SDM dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial yang Menerima Peningkatan Kemampuan	20 Orang	Rp. 5.000.000,00
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan	85,65%	Rp. 10.000.000,00		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan	85,65%	Rp. 10.000.000,00
1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Pasuruan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi	85,65%	Rp. 10.000.000,00	1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Pasuruan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi	85,65%	Rp. 10.000.000,00
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi	5 Orang	Rp. 10.000.000,00	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi	5 Orang	Rp. 10.000.000,00

		untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Kabupaten ke Desa/Kelurahan Asal				untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Kabupaten ke Desa/Kelurahan Asal		
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Persentase PMKS yang Tertangani	85,65%	Rp. 2.235.500.000,00		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PMKS yang Tertangani	85,65%	Rp. 2.235.500.000,00
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Pasuruan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	85,65%	Rp. 1.932.500.000,00	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pasuruan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	85,65%	Rp. 1.932.500.000,00
	1	Penyediaan Permakanan		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Permakanan	37 Lembaga	Rp. 1.617.500.000,00	1	Penyediaan Permakanan		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Permakanan	37 Lembaga	Rp. 1.617.500.000,00
	2	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Alat Bantu	37 Orang	Rp. 72.000.000,00	2	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Alat Bantu	37 Orang	Rp. 72.000.000,00
	3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Bimbingan	240 Jiwa	Rp. 95.000.000,00	3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Bimbingan	240 Jiwa	Rp. 95.000.000,00
	4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapat Bimbingan	287 Jiwa	Rp. 148.000.000,00	4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapat Bimbingan	287 Jiwa	Rp. 148.000.000,00

	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pasuruan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial	85,65%	Rp. 303.000.000,00	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pasuruan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial	85,65%	Rp. 303.000.000,00	
	1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	5 Orang	Rp. 3.000.000,00	1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	5 Orang	Rp. 3.000.000,00	
	2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Jumlah PMKS Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapat Bimbingan	225 Orang	Rp. 220.000.000,00	2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Jumlah PMKS Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapat Bimbingan	225 Orang	Rp. 220.000.000,00	
	3	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Layanan Rujukan yang Diberikan	6 Kecamatan	Rp. 80.000.000,00	3	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Layanan Rujukan yang Diberikan	6 Kecamatan	Rp. 80.000.000,00	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Persentase PMKS dan Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Sosialnya	85,65%	Rp. 503.000.000,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Persentase PMKS dan Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Sosialnya	85,65%	Rp. 503.000.000,00	
	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pasuruan	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapat Pelayanan Dasar	85,65%	Rp. 503.000.000,00	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pasuruan	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapat Pelayanan Dasar	85,65%	Rp. 503.000.000,00	
	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Fakir Miskin yang Terbaru	4 Pengesahan (1 Data)	Rp. 15.000.000,00	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Fakir Miskin yang Terbaru	4 Pengesahan (1 Data)	Rp. 15.000.000,00	
	2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Fakir Miskin yang Mendapat Bantuan Kesejahteraan Sosial	337 SDM PKH dan 300 Orang	Rp. 438.000.000,00	2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Fakir Miskin yang Mendapat Bantuan Kesejahteraan Sosial	337 SDM PKH dan 300 Orang	Rp. 438.000.000,00	
	3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Fakir Miskin yang Menindaklanjuti Hasil Bimbingan Sosial dan Ketrampilan	2 Kube	Rp. 50.000.000,00	3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Fakir Miskin yang Menindaklanjuti Hasil Bimbingan Sosial dan Ketrampilan	2 Kube	Rp. 50.000.000,00	

6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Persentase Korban Bencana yang Tertangani	6,58%	Rp. 270.000.000,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana yang Tertangani	6,58%	Rp. 270.000.000,00	
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pasuruan	Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Penanganan	6,58%	Rp. 70.000.000,00	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pasuruan	Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Penanganan	6,58%	Rp. 70.000.000,00
		1		Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Penyediaan Makanan	250 Orang	Rp. 50.000.000,00		1		Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Penyediaan Makanan	250 Orang	Rp. 50.000.000,00
		2		Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Pelayanan	10 Orang	Rp. 20.000.000,00		2		Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Pelayanan	10 Orang	Rp. 20.000.000,00
	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Pasuruan	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang Diberdayakan	6,58%	Rp. 200.000.000,00	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Pasuruan	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang Diberdayakan	6,58%	Rp. 200.000.000,00
		1		Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	55 Orang	Rp. 50.000.000,00		1		Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	55 Orang	Rp. 50.000.000,00
		2		Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	45 Orang	Rp. 150.000.000,00		2		Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	45 Orang	Rp. 150.000.000,00
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Persentase Pengelolaan TMP	6,58%	Rp. 102.500.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Pengelolaan TMP	6,58%	Rp. 102.500.000,00	
	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pasuruan	Jumlah TMP yang Dipelihara	6,58%	Rp. 102.500.000,00	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pasuruan	Jumlah TMP yang Dipelihara	6,58%	Rp. 102.500.000,00
		1		Jumlah TMP yang Terpelihara dan Jumlah Honorarium Penjaga TMP	12 Orang/1 1 TMP	Rp. 102.500.000,00		1		Jumlah TMP yang Terpelihara dan Jumlah Honorarium Penjaga TMP	12 Orang/1 1 TMP	Rp. 102.500.000,00
						Rp. 6.085.000.000,00						
						Rp. 6.085.000.000,00						

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan pengamatan dilaksanakan Musrenbang Kabupaten Pasuruan, semua usulan masyarakat terhadap program dan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, ternyata tidak ada hubungannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan. Hal ini disebabkan karena Dinas Sosial tugas pokok dan fungsinya lebih berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.

Tabel 2.4

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Pasuruan

Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	dusun krajan kidul, Kab. Pasuruan, Puspo, Puspo	Jumlah TMP yang Terpelihara dan Jumlah Honorarium Penjaga TMP	11 TMP	Pemeliharaan TMP
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Desa Palangsari, Kab. Pasuruan, Puspo, Palangsari	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terbarukan	1 Data	Pusat Layanan Terpadu di Desa
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Desa Andonosari Dusun Krajan III RT 004 RW 002, Kab. Pasuruan, Tukur, Andono Sari	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terbarukan	1 Data	Verval Basis Data Terpadu
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Mangguan RT 001 RW 003, Kab. Pasuruan, Pasrepan, Mangguan	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terbarukan	1 Data	Pusat Layanan Terpadu di Desa
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kecamatan Pasrepan	Jumlah TMP yang Terpelihara dan Jumlah Honorarium Penjaga TMP	11 TMP	Pemeliharaan TMP
6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Lingkungan Parasan RT.003	Jumlah Data Fakir Miskin	1 Data	Pusat Layanan

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	RW.005, Kab. Pasuruan, Grati, Gratinunon	yang Terbaru		Terpadu di Desa
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
7	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Desa Legok, Kab. Pasuruan, Gempol, Legok	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terbaru	1 Data	Pusat Layanan Terpadu di Desa
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
8	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Krajan Rt.04 Rw.02, Kab. Pasuruan, Rembang, Krengih	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terbaru	1 Data	Pusat Layanan Terpadu di Desa
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
9	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Desa Tampung, Kab. Pasuruan, Rembang, Tampung	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terbaru	1 Data	Verval Basis Data Terpadu
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
10	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Desa Tampung, Kab. Pasuruan, Rembang, Tampung	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Alat Bantu	37 Orang	Bantuan Sarpras untuk Disabilitas
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
	Penyediaan Alat Bantu				
11	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kecamatan Pandaan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Alat Bantu	37 Orang	Bantuan 21 Kursi Roda
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
	Penyediaan Alat Bantu				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan	Renstra K/L Kementrian Sosial RI	Nasional
2.	Kegiatan Prioritas Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial	Renstra K/L Kementrian Sosial RI	Nasional
3.	Kegiatan Prioritas Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan Bagi Anak Sekolah	Renstra K/L Kementrian Sosial RI	Nasional
4.	Kegiatan Prioritas Peningkatan Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan	Renstra K/L Kementrian Sosial RI	Nasional
5.	Pencapaian SDGS, Pembangunan Berkelanjutan untuk Mensejahterakan Masyarakat	Renstra Provinsi Jawa Timur	Provinsi
6.	Pengentasan Kemiskinan - Mendukung percepatan penanganan kemiskinan di Jawa Timur melalui perluasan target sasaran penerima bantuan sosial PKH Plus - Pengembangan Kube - Peningkatan sarana prasarana layanan UPT dan perluasan jangkauan layanan UPT melalui sistem home care	Renstra Provinsi Jawa Timur	Provinsi

No.	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial - Penanganan bencana alam, sosial dan teknologi dengan pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana di seluruh kabupaten/kota - Mendukung penyelenggaraan PKH 		
7.	Pencapaian NSPK dan SPM	Renstra Provinsi Jawa Timur	Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan mendukung Misi 1 Bupati yaitu Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Sektor-Sektor Produksi dan Produk-Produk Unggulan Kabupaten Pasuruan Melalui Penguatan Kelembagaan Sosial dan Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Desa Berbasis Masyarakat Dengan Cara Mempermudah Aspek Legal dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Menuju Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun tujuan rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Indikator Angka Kemiskinan

Sasaran rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penanggulangan PMKS dengan Indikator Persentase PMKS
2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

3.3 Rencana Program

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2
01.00	DINAS SOSIAL
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.06.01.2.06.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kab. Pasuruan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp. 1.983.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp. 1.983.000.000,00		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	Rp. 120.000.000,00	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	Rp. 120.000.000,00	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	6 Dokumen	Rp. 40.000.000,00	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	6 Dokumen	Rp. 40.000.000,00	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp. 40.000.000,00	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp. 40.000.000,00	
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang Disusun	1 Laporan	Rp. 40.000.000,00	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi yang Disusun	1 Laporan	Rp. 40.000.000,00	
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	Rp. 750.000.000,00	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	Rp. 750.000.000,00
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang-Bulan	Rp. -	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang-Bulan	Rp. -	

	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	24 Orang-Bulan	Rp. 750.000.000,00		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	24 Orang-Bulan	Rp. 750.000.000,00	
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	100%	Rp. 318.000.000,00		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	100%	Rp. 318.000.000,00	
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47 Unit	Rp. 48.000.000,00		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47 Unit	Rp. 48.000.000,00	
	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	17 Jenis	Rp. 25.000.000,00		2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	17 Jenis	Rp. 25.000.000,00	
	3	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	600 Orang	Rp. 45.000.000,00		3	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	600 Orang	Rp. 45.000.000,00	
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Koordinasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	45 Laporan	Rp. 200.000.000,00		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Koordinasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	45 Laporan	Rp. 200.000.000,00	
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasuruan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp. -		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pasuruan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp. -	
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	Rp. -		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	Rp. -	
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pasuruan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	Rp. 372.500.000,00		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pasuruan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	Rp. 372.500.000,00	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat yang Dikirim Melalui Jasa Kurir	150 Surat	Rp. 5.500.000,00		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat yang Dikirim Melalui Jasa Kurir	150 Surat	Rp. 5.500.000,00	

	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Pembayaran Telpun, Air dan Internet Selama 12 bulan	36 Rekening	Rp. 158.000.000,00		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Pembayaran Telpun, Air dan Internet Selama 12 bulan	36 Rekening	Rp. 158.000.000,00	
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Jenis	Rp. 110.000.000,00		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Jenis	Rp. 110.000.000,00	
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Layanan Umum Kantor	47 Jenis	Rp. 99.000.000,00		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Layanan Umum Kantor	47 Jenis	Rp. 99.000.000,00	
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pasuruan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp. 350.000.000,00		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pasuruan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp. 350.000.000,00	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	Rp. 300.000.000,00		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	Rp. 300.000.000,00	
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	Rp. 50.000.000,00		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	Rp. 50.000.000,00	
	7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%	Rp. 72.500.000,00		7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pasuruan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%	Rp. 72.500.000,00	
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	Rp. 72.500.000,00		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	Rp. 72.500.000,00	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Persentase PMKS dan PSKS	6,58%	Rp. 981.000.000,00		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Persentase PMKS dan PSKS	6,58%	Rp. 981.000.000,00	

1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Pasuruan	Peremberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	6,58%	Rp. 473.000.000,00	1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Pasuruan	Peremberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	6,58%	Rp. 473.000.000,00
1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT		Jumlah Bantuan yang Disalurkan	400 Orang	Rp. 473.000.000,00	1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT		Jumlah Bantuan yang Disalurkan	400 Orang	Rp. 473.000.000,00
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pasuruan	Jumlah PSKS yang Menindaklanjuti Pemberdayaan	6,58%	Rp. 508.000.000,00	2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pasuruan	Jumlah PSKS yang Menindaklanjuti Pemberdayaan	6,58%	Rp. 508.000.000,00
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang Menerima Peningkatan Kemampuan	48 Orang / 4 Laporan	Rp. 478.000.000,00	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang Menerima Peningkatan Kemampuan	48 Orang / 4 Laporan	Rp. 478.000.000,00
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang Menerima Peningkatan Kemampuan	100 Orang	Rp. 25.000.000,00	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang Menerima Peningkatan Kemampuan	100 Orang	Rp. 25.000.000,00
3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah SDM dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial yang Menerima Peningkatan Kemampuan	20 Orang	Rp. 5.000.000,00	3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah SDM dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial yang Menerima Peningkatan Kemampuan	20 Orang	Rp. 5.000.000,00
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan	85,65%	Rp. 10.000.000,00		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan	85,65%	Rp. 10.000.000,00
1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Pasuruan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi	85,65%	Rp. 10.000.000,00	1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Pasuruan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi	85,65%	Rp. 10.000.000,00
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi	5 Orang	Rp. 10.000.000,00	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi	5 Orang	Rp. 10.000.000,00

		untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Kabupaten ke Desa/Kelurahan Asal				untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Kabupaten ke Desa/Kelurahan Asal			
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Persentase PMKS yang Tertangani	85,65%	Rp. 2.235.500.000,00		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PMKS yang Tertangani	85,65%	Rp. 2.235.500.000,00	
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pasuruan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	85,65%	Rp. 1.932.500.000,00		1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pasuruan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	85,65%	Rp. 1.932.500.000,00
	1	Penyediaan Permakanan		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Permakanan	37 Lembaga	Rp. 1.617.500.000,00		1	Penyediaan Permakanan		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Permakanan	37 Lembaga	Rp. 1.617.500.000,00
	2	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Alat Bantu	37 Orang	Rp. 72.000.000,00		2	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Alat Bantu	37 Orang	Rp. 72.000.000,00
	3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Bimbingan	240 Jiwa	Rp. 95.000.000,00		3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Bimbingan	240 Jiwa	Rp. 95.000.000,00
	4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapat Bimbingan	287 Jiwa	Rp. 148.000.000,00		4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan		Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapat Bimbingan	287 Jiwa	Rp. 148.000.000,00

	3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Fakir Miskin yang Menindaklanjuti Hasil Bimbingan Sosial dan Ketrampilan	2 Kube	Rp. 50.000.000,00		3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Fakir Miskin yang Menindaklanjuti Hasil Bimbingan Sosial dan Ketrampilan	2 Kube	Rp. 50.000.000,00	
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Persentase Korban Bencana yang Tertangani	6,58%	Rp. 270.000.000,00		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Persentase Korban Bencana yang Tertangani	6,58%	Rp. 270.000.000,00	
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pasuruan	Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Penanganan	6,58%	Rp. 70.000.000,00		1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pasuruan	Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Penanganan	6,58%	Rp. 70.000.000,00	
	1	Penyediaan Makanan		Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Penyediaan Makanan	250 Orang	Rp. 50.000.000,00		1	Penyediaan Makanan		Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Penyediaan Makanan	250 Orang	Rp. 50.000.000,00	
	2	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Pelayanan	10 Orang	Rp. 20.000.000,00		2	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Pelayanan	10 Orang	Rp. 20.000.000,00	
	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Pasuruan	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang Diberdayakan	6,58%	Rp. 200.000.000,00		2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Pasuruan	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang Diberdayakan	6,58%	Rp. 200.000.000,00	
	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	55 Orang	Rp. 50.000.000,00		1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	55 Orang	Rp. 50.000.000,00	
	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	45 Orang	Rp. 150.000.000,00		2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	45 Orang	Rp. 150.000.000,00	
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Persentase Pengelolaan TMP	6,58%	Rp. 102.500.000,00		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Persentase Pengelolaan TMP	6,58%	Rp. 102.500.000,00	
	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pasuruan	Jumlah TMP yang Dipelihara	6,58%	Rp. 102.500.000,00		1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pasuruan	Jumlah TMP yang Dipelihara	6,58%	Rp. 102.500.000,00	

		1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah TMP yang Terpelihara dan Jumlah Honorarium Penjaga TMP	12 Orang/1 1 TMP	Rp. 102.500.000,00			1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah TMP yang Terpelihara dan Jumlah Honorarium Penjaga TMP	12 Orang/1 1 TMP	Rp. 102.500.000,00	
							Rp. 6.085.000.000,00								Rp. 6.085.000.000,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran sumber anggaran dan jumlah anggaran setiap kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan untuk Tahun 2022.

Adapun Target Capaian Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan untuk Tahun 2022 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
XX	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	: Rp 1.983.000.000			100%	#REF!
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100%	: Rp 120.000.000			100%	Rp 138.000.000
1.06.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	Pasuruan	6 Dokumen	: Rp 40.000.000	APBD		6 Dokumen	Rp 46.000.000
					Belanja operasi : Rp 40.000.000				Rp 46.000.000
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 40.000.000				Rp 46.000.000
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -

					Belanja transfer	:	Rp	-				Rp	-
1.06.01.2.01.06	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pasuruan	1 Laporan		Rp	40.000.000	APBD		1 Laporan	Rp	46.000.000
					Belanja operasi	:	Rp	40.000.000				Rp	46.000.000
					Belanja pegawai	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	:	Rp	40.000.000				Rp	46.000.000
					Belanja bunga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	:	Rp	-				Rp	-
1.06.01.2.01.07	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang Disusun	Pasuruan	1 Laporan		Rp	40.000.000	APBD		1 Laporan	Rp	46.000.000
					Belanja operasi	:	Rp	40.000.000				Rp	46.000.000
					Belanja pegawai	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	:	Rp	40.000.000				Rp	46.000.000
					Belanja bunga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				Rp	-

					Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%		Rp	750.000.000			100%	Rp 862.500.000
1.06.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	Pasuruan	30 Orang-Bulan		Rp	-	APBD		30 Orang-Bulan	Rp -
					Belanja operasi	: Rp	-			Rp	-
					Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp	-			Rp	-
					Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
					Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
					Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-
1.06.01.2.02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	Pasuruan	24 Orang-Bulan		Rp	750.000.000	APBD		24 Orang-Bulan	Rp 862.500.000
					Belanja operasi	: Rp	750.000.000			Rp	862.500.000
					Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp	750.000.000			Rp	862.500.000

					Belanja bunga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	:	Rp	-				Rp	-
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum		100%			Rp	318.000.000			100%	Rp	365.700.000
1.06.01.2.06.02	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pasuruan	47 Unit			Rp	48.000.000	APBD		47 Unit	Rp	55.200.000
					Belanja operasi	:	Rp	48.000.000				Rp	55.200.000
					Belanja pegawai	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	:	Rp	48.000.000				Rp	55.200.000
					Belanja bunga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	:	Rp	-				Rp	-

1.06.01.2.06.05	2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetakan dan Penggandaan	Pasuruan	17 Jenis	Rp 25.000.000	APBD	17 Jenis	Rp 28.750.000
						Belanja operasi : Rp 25.000.000			Rp 28.750.000
						Belanja pegawai : Rp -			Rp -
						Belanja barang dan jasa : Rp 25.000.000			Rp 28.750.000
						Belanja bunga : Rp -			Rp -
						Belanja subsidi : Rp -			Rp -
						Belanja hibah : Rp -			Rp -
						Belanja bantuan sosial : Rp -			Rp -
						Belanja modal : Rp -			Rp -
						Belanja tidak terduga : Rp -			Rp -
						Belanja transfer : Rp -			Rp -
1.06.01.2.06.08	3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	Pasuruan	600 Orang	Rp 45.000.000	APBD	600 Orang	Rp 51.750.000
						Belanja operasi : Rp 45.000.000			Rp 51.750.000
						Belanja pegawai : Rp -			Rp -
						Belanja barang dan jasa : Rp 45.000.000			Rp 51.750.000
						Belanja bunga : Rp -			Rp -
						Belanja subsidi : Rp -			Rp -
						Belanja hibah : Rp -			Rp -
						Belanja bantuan sosial : Rp -			Rp -
						Belanja modal : Rp -			Rp -

					Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-
1.06.01.2.06.09	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	Pasuruan	45 Laporan		Rp	200.000.000	APBD	45 Laporan	Rp	230.000.000
					Belanja operasi	: Rp	200.000.000			Rp	230.000.000
					Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp	200.000.000			Rp	230.000.000
					Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
					Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
					Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100%		Rp	-		100%		#REF!
1.06.01.2.07.02	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pasuruan	1 Unit		Rp	-	APBD	1 Unit	Rp	-
					Belanja operasi	: Rp	-			Rp	-
					Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp	-			Rp	-
					Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-

					Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
					Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
					Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang		100%		Rp	372.500.000			100%	Rp 428.375.000
1.06.01.2.08.01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim Melalui Jasa Kurir	Pasuruan	150 Surat		Rp	5.500.000	APBD		150 Surat	Rp 6.325.000
					Belanja operasi	: Rp	5.500.000				Rp 6.325.000
					Belanja pegawai	: Rp	-				Rp -
					Belanja barang dan jasa	: Rp	5.500.000				Rp 6.325.000
					Belanja bunga	: Rp	-				Rp -
					Belanja subsidi	: Rp	-				Rp -
					Belanja hibah	: Rp	-				Rp -
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-				Rp -
					Belanja modal	: Rp	-				Rp -
					Belanja tidak terduga	: Rp	-				Rp -
					Belanja transfer	: Rp	-				Rp -
1.06.01.2.08.02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telpon, Air dan Internet Selama 12 bulan	Pasuruan	36 Rekening		Rp	158.000.000	APBD		36 Rekening	Rp 181.700.000

					Belanja operasi	: Rp	158.000.000				Rp	181.700.000
					Belanja pegawai	: Rp	-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp	158.000.000				Rp	181.700.000
					Belanja bunga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	: Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	: Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-				Rp	-
1.06.01.2.08.03	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pasuruan	17 Jenis		Rp 110.000.000	APBD		17 Jenis	Rp 126.500.000	
					Belanja operasi	: Rp	110.000.000				Rp	126.500.000
					Belanja pegawai	: Rp	-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp	110.000.000				Rp	126.500.000
					Belanja bunga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	: Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	: Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-				Rp	-

1.06.01.2.08.04	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Layanan Umum Kantor	Pasuruan	47 Jenis		Rp 99.000.000	APBD		47 Jenis	Rp 113.850.000
						Belanja operasi	: Rp 99.000.000				Rp 113.850.000
						Belanja pegawai	: Rp 99.000.000				Rp 113.850.000
						Belanja barang dan jasa	: Rp -				Rp -
						Belanja bunga	: Rp -				Rp -
						Belanja subsidi	: Rp -				Rp -
						Belanja hibah	: Rp -				Rp -
						Belanja bantuan sosial	: Rp -				Rp -
						Belanja modal	: Rp -				Rp -
						Belanja tidak terduga	: Rp -				Rp -
						Belanja transfer	: Rp -				Rp -
1.06.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	4 Unit	Rp 350.000.000			100%	Rp 402.500.000
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pasuruan	4 Unit		Rp 300.000.000	APBD		4 Unit	Rp 345.000.000
						Belanja operasi	: Rp 300.000.000				Rp 345.000.000
						Belanja pegawai	: Rp -				Rp -
						Belanja barang dan jasa	: Rp 300.000.000				Rp 345.000.000
						Belanja bunga	: Rp -				Rp -
						Belanja subsidi	: Rp -				Rp -

					Belanja hibah	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	:	Rp	-				Rp	-
1.06.01.2.09.11	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pasuruan	(diisi)	2 Unit	Rp	50.000.000	APBD		(diisi)	Rp	57.500.000
						Belanja operasi	:	Rp	50.000.000			Rp	57.500.000
						Belanja pegawai	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	50.000.000			Rp	57.500.000
						Belanja bunga	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja subsidi	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja hibah	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja modal	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja transfer	:	Rp	-			Rp	-
1.06.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian		100%	4 Unit	Rp	72.500.000			100%	Rp	83.375.000

	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pasuruan	58 Orang	Rp 72.500.000	APBD	58 Orang	Rp 83.375.000
					Belanja operasi : Rp 72.500.000			Rp 83.375.000
					Belanja pegawai : Rp -			Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 72.500.000			Rp 83.375.000
					Belanja bunga : Rp -			Rp -
					Belanja subsidi : Rp -			Rp -
					Belanja hibah : Rp -			Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -			Rp -
					Belanja modal : Rp -			Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -			Rp -
					Belanja transfer : Rp -			Rp -
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	BIDANG FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SSOSIAL				Rp 1.083.500.000			#REF!
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS dan PSKS		6,58%	Rp 981.000.000		6,58%	Rp 1.128.150.000
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Peremberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		6,58%	Rp 473.000.000		6,58%	Rp 543.950.000

1.06.01.2.01.01	1 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Bantuan yang Disalurkan	Pasuruan	400 Orang	Rp 473.000.000	APBD		400 Orang	Rp 543.950.000
					Belanja operasi : Rp 473.000.000				Rp 543.950.000
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 23.000.000				Rp 26.450.000
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp 450.000.000				Rp 517.500.000
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Belanja transfer : Rp -				Rp -
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Menindaklanjuti Pemberdayaan		6,58%	Rp 508.000.000			6,58%	Rp 584.200.000
1.06.02.2.03.01	1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang Menerima Peningkatan Kemampuan	Pasuruan	48 Orang / 4 Laporan	Rp 550.620.000	APBD		48 Orang / 4 Laporan	Rp 549.700.000
					Belanja operasi : Rp 478.000.000				Rp 549.700.000
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 478.000.000				Rp 549.700.000
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -

					Belanja hibah	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	:	Rp	-				Rp	-
1.06.02.2.03.04	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang Menerima Peningkatan Kemampuan	Pasuruan	100 Orang		Rp	25.000.000	APBD		100 Orang	Rp	28.750.000
					Belanja operasi	:	Rp	25.000.000				Rp	28.750.000
					Belanja pegawai	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	:	Rp	25.000.000				Rp	28.750.000
					Belanja bunga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	:	Rp	-				Rp	-
1.06.02.2.03.05	3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial yang Menerima Peningkatan Kemampuan	Pasuruan	20 Orang		Rp	5.000.000	APBD		20 Orang	Rp	5.750.000
					Belanja operasi	:	Rp	5.000.000				Rp	5.750.000

					Belanja pegawai	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	:	Rp	5.000.000				Rp	5.750.000
					Belanja bunga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	:	Rp	-				Rp	-
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan TMP		6,58%			Rp	102.500.000			6,58%	#REF!	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang Dipelihara		6,58%			Rp	102.500.000			6,58%	#REF!	
	1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang Terpelihara dan Jumlah Honorarium Penjaga TMP	Pasuruan	12 Orang/11 TMP			Rp	102.500.000	APBD		112 Orang dan 11 TMP	Rp	117.875.000
					Belanja operasi	:	Rp	102.500.000				Rp	117.875.000
					Belanja pegawai	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	:	Rp	102.500.000				Rp	117.875.000
					Belanja bunga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				Rp	-

					Belanja modal	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	:	Rp	-				Rp	-
	BIDANG REHABILITASI SOSIAL							Rp 2.245.500.000				Rp 2.582.325.000	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang Tertangani		85,65%				Rp 2.235.500.000			85,65%	Rp 2.570.825.000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial		85,65%				Rp 1.932.500.000			85,65%	Rp 2.222.375.000	
1.06.04.2.01.01	1 Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Permakanan	Pasuruan	37 Lembaga				Rp 1.617.500.000	APBD		37 Lembaga	Rp 1.860.125.000	
					Belanja operasi	:	Rp	1.617.500.000				Rp	1.860.125.000
					Belanja pegawai	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	:	Rp	117.500.000				Rp	135.125.000
					Belanja bunga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	:	Rp	1.500.000.000				Rp	1.725.000.000
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	:	Rp	-				Rp	-

1.06.04.2.01.03	2	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Alat Bantu	Pasuruan	37 Orang	Rp	72.000.000	APBD		37 Orang	Rp	82.800.000
						Belanja operasi	: Rp 72.000.000				Rp	82.800.000
						Belanja pegawai	: Rp -				Rp	-
						Belanja barang dan jasa	: Rp 72.000.000				Rp	82.800.000
						Belanja bunga	: Rp -				Rp	-
						Belanja subsidi	: Rp -				Rp	-
						Belanja hibah	: Rp -				Rp	-
						Belanja bantuan sosial	: Rp -				Rp	-
						Belanja modal	: Rp -				Rp	-
						Belanja tidak terduga	: Rp -				Rp	-
						Belanja transfer	: Rp -				Rp	-
1.06.04.2.01.05	3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Bimbingan	Pasuruan	240 Jiwa	Rp	95.000.000	APBD		240 Jiwa	Rp	109.250.000
						Belanja operasi	: Rp 95.000.000				Rp	109.250.000
						Belanja pegawai	: Rp -				Rp	-
						Belanja barang dan jasa	: Rp 95.000.000				Rp	109.250.000
						Belanja bunga	: Rp -				Rp	-
						Belanja subsidi	: Rp -				Rp	-
						Belanja hibah	: Rp -				Rp	-
						Belanja bantuan sosial	: Rp -				Rp	-

					Belanja modal	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	:	Rp	-				Rp	-
1.06.04.2.01.06	4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial	Pasuruan	287 Jiwa			Rp 148.000.000	APBD		287 Jiwa	Rp 170.200.000	
					Belanja operasi	:	Rp	148.000.000				Rp	170.200.000
					Belanja pegawai	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	:	Rp	148.000.000				Rp	170.200.000
					Belanja bunga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	:	Rp	-				Rp	-
1.06.04.2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial		85,65%			Rp 303.000.000			85,65%	Rp 348.450.000	
1.06.04.2.02.07	1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	Pasuruan	5 Orang			Rp 3.000.000	APBD		5 Orang	Rp 3.450.000	

					Belanja transfer	:	Rp	-				Rp	-
1.06.04.2.02.13	3	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan yang Diberikan	Pasuruan	6 Kecamatan		Rp	80.000.000	APBD		6 Kecamatan	Rp	92.000.000
						Belanja operasi	:	Rp	80.000.000			Rp	92.000.000
						Belanja pegawai	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	80.000.000			Rp	92.000.000
						Belanja bunga	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja subsidi	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja hibah	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja modal	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja transfer	:	Rp	-			Rp	-
1.06.03		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan		85,65%		Rp	10.000.000			85,65%	Rp	11.500.000
1.06.03.2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi		85,65%		Rp	10.000.000			85,65%	Rp	11.500.000
1.06.03.2.01.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi Kabupaten ke Desa/Kelurahan Asal	Pasuruan	5 Orang		Rp	10.000.000	APBD		5 Orang	Rp	11.500.000

					Belanja operasi	:	Rp	10.000.000				Rp	11.500.000
					Belanja pegawai	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	:	Rp	10.000.000				Rp	11.500.000
					Belanja bunga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	:	Rp	-				Rp	-
	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							Rp 773.000.000				Rp 888.950.000	
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS dan Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Sosialnya		85,65%				Rp 503.000.000			85,65%	Rp 578.450.000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapat Pelayanan Dasar		85,65%				Rp 578.715.811			85,65%	Rp 578.450.000	
1.06.05.2.02.02	1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terbarukan	Pasuruan	4 Pengesahan (1 Data)				Rp 15.000.000	APBD		4 Pengesahan (1 Data)	Rp 17.250.000	
					Belanja operasi	:	Rp	15.000.000				Rp	17.250.000
					Belanja pegawai	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	:	Rp	15.000.000				Rp	17.250.000
					Belanja bunga	:	Rp	-				Rp	-

					Belanja subsidi	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	:	Rp	-				Rp	-
1.06.05.2.02.03	2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapat Bantuan Kesejahteraan Sosial	Pasuruan	337 SDM PKH dan 300 Orang		Rp	438.000.000	APBD		337 SDM PKH dan 300 Orang	Rp	503.700.000
						Belanja operasi	:	Rp	438.000.000			Rp	503.700.000
						Belanja pegawai	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	438.000.000			Rp	503.700.000
						Belanja bunga	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja subsidi	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja hibah	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja modal	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja transfer	:	Rp	-			Rp	-
1.06.05.2.02.04	3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fakir Miskin yang Menindaklanjuti Hasil Bimbingan Sosial dan Ketrampilan	Pasuruan	2 Kube		Rp	50.000.000	APBD		2 Kube	Rp	57.500.000
						Belanja operasi	:	Rp	50.000.000			Rp	57.500.000
						Belanja pegawai	:	Rp	-			Rp	-

					Belanja barang dan jasa	:	Rp	50.000.000				Rp	57.500.000
					Belanja bunga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	:	Rp	-				Rp	-
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Tertangani		6,58%			Rp	270.000.000			6,58%	Rp	310.500.000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Penanganan		6,58%			Rp	70.000.000			6,58%	Rp	80.500.000
1.06.06.2.01.01	1 Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Penyediaan Makanan	Pasuruan	250 Orang			Rp	50.000.000	APBD		250 Orang	Rp	57.500.000
					Belanja operasi	:	Rp	50.000.000				Rp	57.500.000
					Belanja pegawai	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	:	Rp	50.000.000				Rp	57.500.000
					Belanja bunga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	:	Rp	-				Rp	-

					Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-
1.06.06.2.01.05	2	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Pelayanan	Pasuruan	10 Orang		Rp 20.000.000	APBD		10 Orang	Rp 23.000.000
					Belanja operasi	: Rp	20.000.000			Rp	23.000.000
					Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp	20.000.000			Rp	23.000.000
					Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
					Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
					Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-
1.06.06.2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang Diberdayakan		6,58%		Rp 200.000.000			6,58%	Rp 230.000.000
1.06.06.2.02.01	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Pasuruan	55 Orang		Rp 50.000.000	APBD		55 Orang	Rp 57.500.000
					Belanja operasi	: Rp	50.000.000			Rp	57.500.000
					Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp	50.000.000			Rp	57.500.000

					Belanja bunga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	:	Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	:	Rp	-				Rp	-
1.06.06.2.02.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pasuruan	45 Orang		Rp	150.000.000	APBD		45 Orang	Rp	172.500.000
						Belanja operasi	:	Rp	150.000.000			Rp	172.500.000
						Belanja pegawai	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	150.000.000			Rp	172.500.000
						Belanja bunga	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja subsidi	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja hibah	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja modal	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-			Rp	-
						Belanja transfer	:	Rp	-			Rp	-
						Total Belanja operasi	:	Rp	6.085.000.000			Rp	6.914.375.000
						Belanja pegawai	:	Rp	99.000.000			Rp	113.850.000

					Belanja barang dan jasa	:	Rp	4.036.000.000					Rp	4.558.025.000
					Belanja bunga	:	Rp	-					Rp	-
					Belanja subsidi	:	Rp	-					Rp	-
					Belanja hibah	:	Rp	1.950.000.000					Rp	2.242.500.000
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-					Rp	-
					Total Belanja modal	:	Rp	-					Rp	-
					Total Belanja tidak terduga	:	Rp	-					Rp	-
					Total Belanja transfer	:	Rp	-					Rp	-
					Total Belanja PD	:	Rp	6.085.000.000					Rp	6.914.375.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mempertimbangkan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan Perencanaan Pembangunan yang berbasis pada Masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku stake holders dalam menciptakan Good Governmence sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya kebawah sehingga keterihakan pada Masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Pada saat mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat pada tahun sebelumnya (2020 – 2021) masih banyak ditemukan hambatan yang terjadi dilapangan. Belum maksimalnya kompetensi SDM yang ada pada sosial dilapangan serta terbatasnya anggaran untuk digunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas sosial menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan program-program yang ada di tahun sebelumnya, oleh sebab itu maka pada tahun 2022 diharapkan ada penambahan jumlah anggaran yang lebih besar guna membantu pemerintah dalam menangani masalah sosial, mengingat dampak pandemi Covid-19 saat ini memicu berkembangnya permasalahan sosial disamping masalah bencana alam yang setiap musim terjadi di Kabupaten Pasuruan dengan kondisi yang cukup memprihatinkan dan membutuhkan penanganan secara khusus dan maksimal.

Sehubungan dengan kendala dan hambatan yang ada maka perlu adanya peningkatan kompetensi SDM pada Dinas Sosial dan penambahan jumlah anggaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan dilapangan baik untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial maupun dalam penanganan Bencana agar apa yang menjadi tujuan, tugas pokok dan fungsi dinas sosial dapat terlaksana secara optimal.

Semoga Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2022 dapat terlaksana dan dapat mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang bersinergi secara optimal sebagai perwujudan sistem pemerintahan yang akuntabel.

BUPATI PASURUAN.

ttd.

M. IRSYAD YUSUF